

## Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Analisa Rasio Keuangan

Cut Delsie Hasrina<sup>1</sup>, Yusri<sup>2</sup>, Al Ansori<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5  
Lampoh Keude Aceh Besar

\*Email korespondensi: cut.hasrina@yahoo.com

**Abstract:** *Analysis of financial ratio to Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is one of the parameters in evaluating performance measurement of regional financial management. Analysis of financial performance using the calculation of activities and the growth ratio. This study aims to measure the financial performance of the Local Government of Banda Aceh City during the period of fiscal year 2014 to 2018. The type of research used is descriptive using the ratio analysis method. The results showed that the activity ratio is still low, the growth ratio in the component of Local Original Revenue (PAD) is not good, while the component of the regional income ratio is categorized as moderate, besides that for expenditure growth is categorized as not good because the portion of operating expenditure is greater than capital expenditure. It is expected that the Local Government of Banda Aceh City can further increase PAD, as well as carry out priority scales in budgeting for regional expenditure allocations.*

**Keywords :** *Financial Performance, Growth Ratios and Banda Aceh City Government*

**Abstrak:** Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu parameter dalam mengevaluasi pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan menggunakan perhitungan aktifitas dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan metode analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio aktifitas masih rendah, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, selain itu untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat lebih meningkatkan PAD, serta melakukan skala prioritas dalam penganggaran alokasi belanja daerah.

**Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Pertumbuhan, Pemerintah Kota Banda Aceh**

Pemerintah pusat dalam rangka menjalankan proses desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah yaitu mulai dari hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan peraturan pemerintah (Undang-Undang No 32 Tahun, 2004). Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan instrumen dan tata tertib yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah (Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010, 2010). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituliskan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah (Khikmah, 2014). Dalam rangka melihat sejauhmana perkembangan pertumbuhan daerah tersebut dalam proses pembangunannya maka tentunya kinerja keuangan dari daerah tersebut harus dievaluasi setiap tahunnya.

Kinerja keuangan dapat diungkapkan melalui laporan keuangan yang dapat menyediakan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal, dan komparatif agar dapat mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja badan usaha dalam pengambilan keputusan ekonomi (Yuliana, Marzuki, 2018). Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan untuk dinilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun juga dilihat bagaimana pengalokasian dana tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak (Yusri, 2019). Penilaian akuntabilitas mencakup bagaimana sebuah perusahaan atau pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, tetapi juga terkait tentang pengalokasian anggaran tersebut apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan sesuai kaidah yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Yusri, 2019). Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018. Fokus penelitian adalah menganalisis kinerja keuangan menggunakan perhitungan rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Anggaran Pemerintah**

Penganggaran merupakan hal terpenting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan serta bisa dijelaskan dari berbagai sisi, seperti politik, ekonomi, keuangan, dan akuntansi (Abdullah, Syukriy Nazry, 2015). Proses anggaran pemerintah daerah secara substansi telah berubah sejak awal tahun 1990-an (Kelly, Rivenbark, & C., 2008). Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan tuntutan terhadap akuntabilitas kinerja dan ketersediaan teknologi informasi. Dalam pendekatan rasionalistik, penganggaran harus memenuhi perencanaan yang menyediakan layanan tentang penetapan target layanan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapainya. Beberapa menekankan perencanaan (*planning – programming – budgeting - systems*), tingkat layanan (*zerobased budgeting*) dan penyeragaman sumber daya dengan tujuan (*management-by-objectives*).

Dalam kebijakan fiskal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana jumlah penerimaan sama dengan pengeluaran. Sedangkan anggaran surplus adalah pengeluaran lebih kecil dibandingkan penerimaan. Kemudian

anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Anggaran defisit digunakan ketika pemerintah akan mengatasi masalah pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila pemerintah berencana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi angka pengangguran maka pemerintah harus dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik (Anitasari & Soleh, 2015).

### **Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Susanto (2014) mengatakan bahwa kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan (Susanto, 2014). Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penggunaan analisis rasio difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam kinerja Pemerintah Daerah diantaranya adalah sebagai berikut

#### 1) Rasio Aktifitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

#### 2) Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian.

### a. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendeskripsikan laporan keuangan pokok pemerintah yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 6) Laporan Arus Kas (LAK)
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mendatangi objek penelitian secara langsung guna memperoleh data-data maupun informasi yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan.

#### a. Rasio Aktivitas

Perhitungan Aktivitas Keuangan Daerah dibedakan menjadi rasio total belanja rutin dan rasio modal. Perhitungan dari kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{total belanja rutin}}{\text{total APBD}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap APBD} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total APBD}} \times 100\% \quad (2)$$

#### b. Rasio Pertumbuhan

Perhitungan pertumbuhan keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100\% \quad (3)$$

PAD Tahun p-1

$$\text{Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{(\text{Pendapatan Tahun } p - \text{Pendapatan Tahun } p-1)}{\text{Pendapatan Tahun } p-1} \times 100\% \quad (4)$$

Pendapatan Tahun p-1

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas tentang kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Data yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018.

### a. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan secara proporsional. Semakin tinggi persentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana layanan publik cenderung semakin kecil. Rasio ini diformulasikan sebagai berikut.

**Tabel 1.**

**Aktivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 s.d. 2018**

Tahun Anggaran	APBD	Belanja		Rasio Aktivitas Belanja (%)	
		Operasi	Modal	Operasi	Modal
2014	1.083.686.166.704,00	876.092.874.154,00	207.564.197.996,00	80,85	19,15
2015	1.154.827.388.812,07	933.581.455.818,07	221.109.932.994,00	80,85	19,15
2016	1.234.759.979.058,68	975.070.137.411,64	259.597.341.647,04	78,97	21,03
2017	1.089.345.543.758,54	861.751.438.969,54	227.594.104.789,00	79,11	20,89
2018	1.046.500.852.724,67	945.743.102.355,67	100.757.750.369,00	90,37	9,63
<b>Rata-rata</b>	<b>1.121.823.986.211,59</b>	<b>918.447.801.741,78</b>	<b>203.324.665.559,01</b>	<b>81,87</b>	<b>18,13</b>

Sumber: Data Diolah dari LHP BPK RI atas LKPD Pemerintah Kota Banda Aceh (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, rasio aktifitas belanja Pemerintah Kota Banda Aceh pada komponen belanja operasi berada pada tingkat rata-rata 81,87%, sedangkan belanja modal berada pada tingkat rata-rata 18,13%. Nilai persentase ini menunjukkan bahwa rasio belanja operasi sangat jauh lebih tinggi dari rasio belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh lebih memprioritaskan alokasi dana yang lebih besar pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya porsi alokasi belanja modal dimana dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat maupun layanan publik. Sebagai akibat penganggaran yang demikian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya pemenuhan kebutuhan bagi kepentingan masyarakat umum.

#### b. Rasio Pertumbuhan

Pengukuran rasio pertumbuhan bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tahun berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi daerah yang perlu memperoleh perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode tahun anggaran. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan ini ditabulasikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Rasio Pertumbuhan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2014 s.d. 2018**

Tahun Anggaran	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2014	21,15	6,70	5,23	5,15
2015	22,20	7,36	6,56	6,53
2016	23,19	8,55	4,44	17,41
2017	4,48	-5,85	-11,62	-12,33
2018	-8,85	-8,72	9,75	-55,73

Sumber: Data Diolah dari LHP BPK RI atas LKPD Pemerintah Kota Banda Aceh (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019)

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Pertumbuhan PAD mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 rasio pertumbuhan PAD adalah sebesar 21,15% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 22,20%. Hal ini memperlihatkan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Begitu juga halnya pada tahun 2016, terjadi peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 23,19%. Akan tetapi pada Tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat drastis, hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga perlu adanya evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan maupun anggaran yang telah ditetapkan tersebut. Penurunan yang sangat drastis terjadi di tahun 2018, dimana rasio pertumbuhan PAD adalah menjadi negatif yaitu menjadi -8,85%. Hal ini dikarenakan PAD tahun berjalan lebih sedikit dibandingkan PAD tahun sebelumnya. Hal ini perlu dievaluasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan yang sangat signifikan tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan perhitungan aktifitas pengelolaan keuangan daerah adalah masih rendah. Pemerintah Kota Banda Aceh lebih memprioritaskan alokasi Belanja Operasi dengan tingkat rata-rata 81,87% dibandingkan Belanja Modal dengan tingkat rata-rata 18,13%.
- b. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan perhitungan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan kurang baik, karena terjadi penurunan PAD dan Belanja Modal setiap tahun selama kurun waktu perhitungan tahun anggaran.

## Saran

Berdasarkan analisis di atas, maka saran yang dapat diberikan pada Pemerintah Kota Banda Aceh terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Banda Aceh terus mempertahankan tingkat efektivitas dan berusaha untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pengoptimalisasi perolehan PAD dilakukan dengan melihat sumber-sumber baru penerimaan daerah walaupun jumlah bantuan dana dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih ada.
- c. Memperbesar alokasi Belanja Modal yang berhubungan dengan penyediaan sarana prasarana ekonomi serta layanan publik agar dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy Nazry, R. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 272–283.
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review*, 3(2), 117–127.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Aceh*.
- Kelly, J. M., Rivenbark, & C., W. (2008). Budget Theory in Local Government: The Process-Outcome Conundrum. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal Akuntansi Akunesa Universitas Negeri Surabaya*, 3.
- Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010* (pp. 1–30). pp. 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Susanto, H. (2014). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

*Repository.Ut.Ac.Id.* <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Undang-Undang No 32 Tahun. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. Retrieved from

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

Yuliana, Marzuki, A. F. R. (2018). Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Menyusun Laporan Laba Rugi Pada BPR Ingin Jaya. *Ekonomi Dan Bisnis Politehnik Lhoksemawe*, 20(2), 141–146.

Yusri, C. D. H. (2019). *Analisa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. 3(2), 155–162.